



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : PERWAKILAN OMBUDSMAN RI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LAGAT PARROHA PATAR SIADARI
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
3. NHK : 852037

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.834.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 252.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 151.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 353.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 111.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 111.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 202.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 312 m2/133 m2 di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR , WARISAN Rp. 350.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 303.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 85.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 76.500.000
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000



3. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
6.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	217.360.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	18.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.155.860.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.155.860.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.